

TESIS

**PENGATURAN BATAS *FLIGHT INFORMATION REGION*
JAKARTA DAN *FLIGHT INFORMATION REGION*
SINGAPURA
(*Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022*)**

**RIHAN AZARI
202120518060**

**Tesis ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian Penulis sendiri, dengan arahan Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini Penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat hal yang tidak benar dalam pernyataan ini, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jakarta, 19 April 2024

Yang Membuat Pernyataan

Rihan Azari

201020518060

UNIVERSITAS NASIONAL

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis: Pengaturan *Batas Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (*Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022*).

Proposal Tesis ini telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 16 Februari 2024

Ketua Program	Nama : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.	Tanda Tangan 
Pembimbing	Dr. Mustakin, S.H., M.H.	



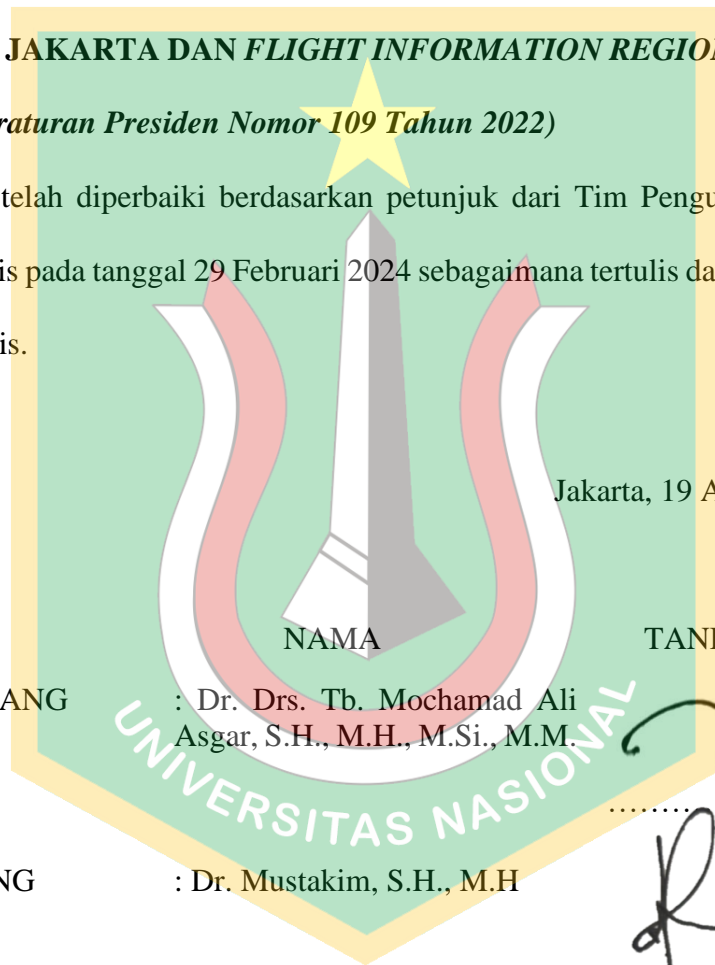
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS


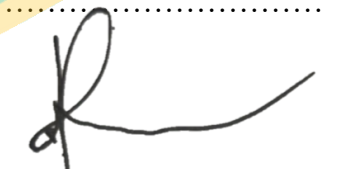
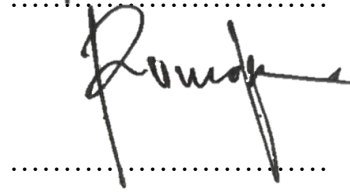

Nama Mahasiswa : Rihan Azari
NPM : 201020518060
Program : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : **PENGATURAN *BATAS FLIGHT INFORMATION***

REGION JAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA
(Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, 19 April 2024



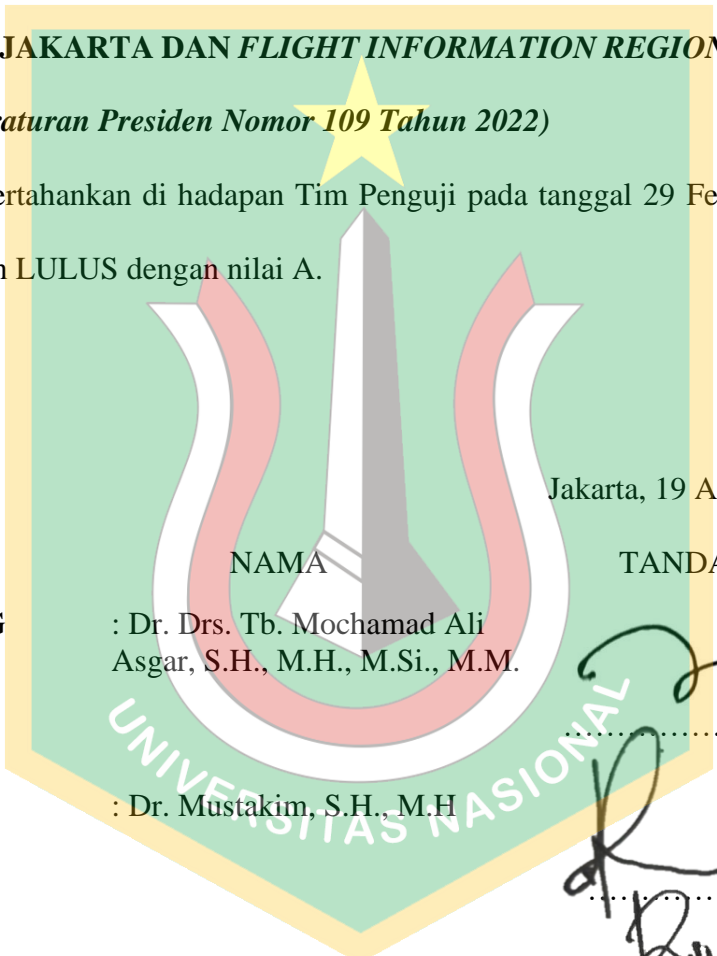
	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA SIDANG	: Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.	
PEMBIMBING	: Dr. Mustakim, S.H., M.H.	
PENGUJI	: Dr. Ismail Rumadan, M.H.	
SEKRETARIS SIDANG	: Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.	

TANDA PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rihan Azari
NPM : 201020518060
Program : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : **PENGATURAN *BATAS FLIGHT INFORMATION***

REGION JAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA
(Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.



Jakarta, 19 April 2024

NAMA
KETUA SIDANG : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.
PEMBIMBING : Dr. Mustakim, S.H., M.H.
PENGUJI : Dr. Ismail Rumadan, M.H.
SEKRETARIS SIDANG : Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.

TANDA TANGAN

[Handwritten signatures of the board members]

ABSTRAK
Universitas Nasional
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
TESIS, 19 April 2024

- A. Nama Mahasiswa** : Rihan Azari
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 201020518060
- C. Judul Tesis** : **Pengaturan Batas *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)**
- D. Jumlah Halaman** : **8 Halaman Pengantar, 122 Halaman Isi, Tahun Pembuatan 2024**
- E. Isi Abstrak** :
- Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara hukum international setiap negara berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara diwilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944), dengan banyaknya wilayah ruang udara Indonesia berbatasan dengan negara lain maka, Pemerintah Indonesia menerapkan penyesuaian batas *flight information region* dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia yang salah satunya melaksanakan perjanjian dengan pemerintah Singapura terkait pengaturan penerbangan sipil di wilayah ruang udara yang berada di perbatasan Indonesia dengan Singapura dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Apakah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia? dan Bagaimana upaya menjaga kedaulatan wilayah ruang udara di Indonesia?.
- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian hukum ini yaitu: Posisi peraturan presiden sebagai *verordnung* dan *autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom) berada di bawah undang-undang (*formal gesetz*) menurut hierarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia yakni melakukan pengamanan di wilayah ruang udara Indonesia serta menindak setiap pelanggaran udara.
- F. Daftar Pustaka** : **26 Buku, 10 Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi Internasional, 17 Jurnal/Internet**
- G. Dosen Pembimbing** : Dr. Mustakim, S.H., M.H

ABSTRACT
National University
Magister of Law Program
Faculty of Law

THESIS, 19 April 2024

- A. Name : Rihan Azari**
- B. Student ID Number : 201020518060**
- C. Thesis Title : Setting the Boundary of Jakarta Flight Information Region and Singapore Flight Information Region (Study of Presidential Regulation Number 109 of 2022)**
- D. Number of Pages : 8 Pages of Introduction, 122 Pages of Content, Year of Manufacture 2024**
- E. Contents of the Abstract :**
Indonesia is a sovereign state which is clearly stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution". In international law, every country has the right to regulate everything related to the security of its country, flight security for every air flight in its territory (Article 12 of the 1944 Chicago Convention), with the large amount of Indonesian airspace bordering other countries, the Indonesian Government applies flight information region boundary adjustments with countries directly adjacent to Indonesia's sovereign territory, one of which is implementing an agreement with the Singapore government regarding the regulation of civil aviation in the airspace located on the Indonesian border with Singapore by stipulating Presidential Regulation Number 109 of 2022. The problems of this research are: Does Presidential Regulation Number 109 of 2022 fulfill the principles of the sovereignty of Indonesia's airspace? and How to maintain the sovereignty of airspace in Indonesia?
The research method used in this research uses normative legal research. The conclusion of this legal research is: The position of presidential regulations as *verordnung* and *autonome satzung* (implementing rules and autonomous rules) is below the law (formal *gesetz*) according to the hierarchy of laws and regulations, meaning that presidential regulations must not conflict with the law. Some of the efforts made in maintaining the sovereignty of Indonesia's airspace are conducting security in Indonesia's airspace and taking action against any air budgeting.
- F. Bibliography : 26 Books, 10 Legislation/International Conventions, 17 Journals/Internet**
- G. Supervisor : Dr. Mustakim, S.H., M.H**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional. Judul yang Penulis ajukan adalah “Pengaturan Batas *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022).”

Untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang teristimewa Keluarga Penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi dan dorongan serta memberikan dukungan baik berupa materiil maupun moril selama Penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, supaya Penulis tidak berputus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan yang setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

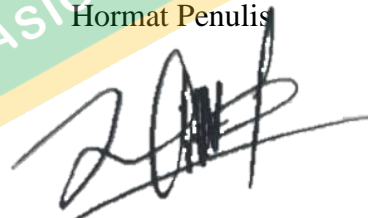
1. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M, selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nasional;

3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang memberikan ilmu, masukan yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis selama belajar dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan; dan
5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Terakhir Penulis sampaikan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 19 April 2024

Hormat Penulis



Rihan Azari
201020518060

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL TESIS

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

TANDA PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
1. Teori Kedaulatan	9
2. Teori Perundang-Undangan	16
3. Teori Perjanjian Internasional	18
E. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan Masalah	23

2.	Jenis Penelitian.....	24
3.	Sumber Data.....	25
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
5.	Analisis Data.....	27
G.	Keaslian Penelitian	27
H.	Sistematika Penulisan	28
	BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP NEGARA HUKUM DAN	
	KEDAULATAN WILAYAH RUANG UDARA	31
A.	Indonesia Negara Hukum	31
B.	Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Indonesia.....	34
C.	Prinsip-Prinsip Dasar Kedaulatan Wilayah Ruang Udara.....	35
D.	Negara, Wilayah, dan Wilayah Udara.....	38
E.	Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Indonesia.....	39
F.	Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Udara	43
1.	Pengertian Hukum Udara	43
2.	Sumber Hukum Udara.....	44
G.	Latar Belakang Lahirnya Hukum Udara.....	49
H.	Wilayah Negara dan <i>Flight Information Region</i>	56
	BAB III PERATURAN BATAS <i>FLIGHT INFORMATION</i>	
	<i>REGION</i> DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR	
	109 TAHUN 2022.....	59

BAB IV ANALISIS HUKUM PERATURAN BATAS <i>FLIGHT INFORMATION REGION</i> JAKARTA DAN <i>FLIGHT INFORMATION REGION</i> SINGAPURA	87
A. Prinsip-Prinsip Kedaulatan Wilayah Ruang Udara Indonesia	87
B. Upaya-Upaya Indonesia Menjaga Kedaulatan	97
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	



